

BAB IV ANALISIS FEMINISME DALAM AGAMA DAN PEMBANGUNAN

Feminisme sebagai suatu *isme* memang secara mudah lantas mengacu pada sebuah gerakan yang dipelopori oleh orang Barat. Bahkan lantas muncul anggapan bahwa feminisme adalah sebuah representasi westernisasi. Anggapan itu perlu diluruskan terlebih dahulu, agar feminisme lebih dapat dipahami secara substansial dan bukan hanya dimengerti kulitnya atau permukaannya saja. Karena jika memahami substansinya, maka apa yang diperjuangkan kaum feminis itu -- yang pada mulanya memang sangat populer berasal dari negara Barat-- sudah lama sekian abad yang lalu ada dalam sejarah berbagai negara di selatan termasuk di Indonesia sendiri yang setidaknya diwakili oleh R. A. Kartini.

Jadi feminisme bukan identik dengan representasi westernisasi manakala kita mencermati betapa Islam sendiri sesungguhnya telah memberikan posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Feminisme memiliki banyak wajah atau sebut saja aliran, hal ini sangat tergantung pada konsep ideologi yang melingkupinya. Seperti feminisme liberal, aliran ini beranggapan bahwa sistem patriarki dalam kehidupan sosial, dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individual terutama

sikap kaum perempuan terhadap laki-laki. Namun kalangan feminisme marxis klasik menolak anggapan itu, individu sebagai penyebab ketertinggalan perempuan. Selanjutnya kaum feminisme radikal yang berpandangan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab adanya pembagian kerja secara seksual adalah sistem patriarki. Sedomikian radikalnya aliran ini sampai menumbuhkan derivasi kelompok ekstrim yang berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki. Sementara kaum feminisme sosialis lebih memfokuskan pada penyadaran kaum perempuan pada posisinya yang tertindas. Feminisme sosialis ini menginginkan adanya pola relasi gender yang setara transformasinya kearah sosialisme.

Perjuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan baik di negara Barat ataupun di Indonesia sangatlah beragam, keragaman perjuangan serta kegiatan yang dilakukan organisasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi setempat; proses pendirian organisasi serta tidak boleh dilupakan bahwa organisasi perempuan tersebut disadari atau tidak banyak mendapatkan pengaruh dari aliran gerakan feminisme dari Barat yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan perempuan yang lain baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Walaupun ada pengaruh aliran gerakan feminisme dari Barat pada organisasi perempuan yang berkembang, namun demikian gerakan yang dilakukan organisasi perempuan tidak selalu berupa perlawanan terhadap struktur yang sudah mapan, ada banyak inisiatif untuk mencari pendekatan dari

sudut pandang lain adalah suatu hal yang seharusnya diupayakan secara terus menerus, lebih-lebih untuk perempuan itu sendiri sepanjang ia mempunyai kepercayaan diri untuk memperjuangkannya, hal ini tidak menutup kemungkinan melibatkan jenis kelamin lain, karena esensi dari perjuangan itu adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia.

Feminisme itu sendiri pada hakekatnya bukan gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, tetapi gerakan untuk menentang ketidakadilan yang diakibatkan oleh ketimpangan gender. Pemahaman terhadap gender yang salah dan tidak *proporsional*, mendorong munculnya tindak kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik, non-fisik, kekerasan ekonomi dan kekerasan secara seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu wujud dari mekanisme sosial yang krusial dan ini tentunya akan menghambat bagi proses kemajuan suatu bangsa.

Marginalisasi dan pensubordinasian terhadap perempuan dapat kita lihat dan terjadi di rumah, di pabrik, di sawah, bahkan sampai di gedung-gedung bertingkat. Perempuan dimanapun disudut-sudut dunia secara kuantitatif adalah mayoritas, akan tetapi secara *signifikan* tidak menunjukkan bagaimana perempuan secara mayoritas dapat mengambil peran-peran penting dalam perancangan kultural, sosial dan politik, tetapi justru malah sebaliknya. Beberapa fakta melaporkan baik itu di negara maju seperti Amerika Serikat, maupun di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, kekerasan dan pelecehan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan.

Ironisnya kondisi ini tidak sedikit masyarakat dengan alasan dan cara apapun bahkan dalam paradigma perempuan itu sendiri terdapat usaha-usaha melanggengkan marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan. Suatu hal yang sulit dimengerti dengan akal sehat, dimana korban menikmati pengorbanannya. Dalam realitasnya ternyata agama juga dijadikan alat legitimasi terhadap struktur yang timpang.

Untuk itu dokmatisme religius dan kultural akan menjadi perhatian yang khusus, karena ia (kultural dan religius) akan mendominasi proses pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, manakala kedua unsur tersebut tidak mendorongnya untuk maju. Agama dan budaya secara signifikan akan mempengaruhi pola dan tindakan manusia secara keseluruhan. Karena keduanya sebagai komponen yang menentukan dari totalitas sosial.

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang luar biasa besar bagi pembangunan dunia pada umumnya dan pada pembangunan nasional Indonesia pada khususnya. Untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam proses pembangunan nasional, tidak hanya dibutuhkan tindakan-tindakan praktis tetapi juga tindakan atau konsep ideologis. Bagaimana pun segala aktifitas perempuan membutuhkan legitimasi ideologis.

Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang sama baik dari segi asal kejadian maupun statusnya. Keduanya memiliki kewajiban yang sama pada peringkat etika religius, serta kewajiban yang sejajar pada peringkat fungsi sosial. Kesanggupan manusia untuk berprestasi ditentukan oleh rentang sosio-historis

dimana ia ditempatkan. Artinya ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan peradaban kebudayaan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. karena kehidupan dunia manusia bukan fenomena biologis melainkan fenomena sosio-historis. Ia bukan dunia instink, ia adalah dunia pilihan, dunia rencana dan rancangan.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan fenomena *dikotomis antagonistik* melainkan fenomena dialektis. Perbedaan jenis kelamin adalah relatif, komplementer, interaktif dan dinamis baik secara individual maupun secara sosial. Dalam hal ini era modern sangat bertentangan dengan masa-masa awal sejarah manusia. Ia lebih menepiskan tragedi biologis kaum perempuan. Ia telah menawarkan kepada putra-putri masa kini kesempatan yang lebih besar untuk berkarya dan berprestasi dalam kehidupan dan aktifitas diluar rumah yang lebih dinamis. Di era modern ini kaum perempuan meraih prestasi dalam sains dan teknologi, kesusastraan, politik, sosial, dan agama.

Bahkan dalam buku Megatrarend 2000, *John Naisbit* bersama istrinya *Patrisia Aburdene*, menuliskan bahwa abad 2000 adalah era perempuan yaitu perempuan akan tampil memimpin. Terlepas dari benar atau salah prediksi tersebut dalam realitasnya Presiden Nikaragua adalah perempuan yaitu nyonya *Violeta Chamorro*, Presiden Philipina *Margaret Thatcher*, Pakistan *Benazir Botto*, walaupun eksistensinya banyak kalangan yang tidak menghendaki kepemimpinan perempuan dan kenyataannya, mereka akhirnya digoyang dan jatuh sedangkan,

A. Agama Diera Pembangunan

Agama memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menegakkan nilai-nilai luhur bagi pelstarian pembangunan. Landasan iman dan takwa berjalan seiring sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bila diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat lebih bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka *internalisasi* nilai-nilai agama dalam proses pembangunan, maka kebijaksanaan dijalur pendidikan merupakan politik tertinggi pembangunan bangsa dengan semakin meningkatnya pemahaman terhadap kemitarasejajaran dan kesadaran gender dalam menentukan masa depan bangsa, peluang kaum perempuan semakin terbuka lebar untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan secara keseluruhan baik dalam bidang fisik maupun peningkatan ketahanan mental spiritual yang diwujudkan dalam bentuk penanaman akhlak dan budi pekerti luhur yang sesuai dengan kultur dan budaya bangsa.

Islam mengakui hak-hak perempuan untuk memilih, menentukan, melakukan transaksi, memimpin organisasi, menuntut ilmu, memiliki kepribadian yang setara dengan laki-laki dalam soal kewajiban beragama. Disini agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong bagi tindakan anggota masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai dan ajaran agamanya. Dalam kehidupan, agama

dimana ia ditempatkan. Artinya ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan peradaban kebudayaan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kehidupan dunia manusia bukan fenomena biologis melainkan fenomena sosio-historis. Ia bukan dunia instink, ia adalah dunia pilihan, dunia rencana dan rancangan.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan fenomena *dikotomis antagonistik* melainkan fenomena dialektis. Perbedaan jenis kelamin adalah relatif, komplementer, interaktif dan dinamis baik secara individual maupun secara sosial. Dalam hal ini era modern sangat bertentangan dengan masa-masa awal sejarah manusia. Ia lebih menepiskan tragedi biologis kaum perempuan. Ia telah menawarkan kepada putra-putri masa kini kesempatan yang lebih besar untuk berkarya dan berprestasi dalam kehidupan dan aktifitas diluar rumah yang lebih dinamis. Di era modern ini kaum perempuan meraih prestasi dalam sains dan teknologi, kesusastraan, politik, sosial, dan agama.

Bahkan dalam buku Megatrend 2000, *John Naisbit* bersama istrinya *Patrisia Aburdene*, menuliskan bahwa abad 2000 adalah era perempuan yaitu perempuan akan tampil memimpin. Terlepas dari benar atau salah prediksi tersebut dalam realitasnya Presiden Nikaragua adalah perempuan yaitu nyonya *Violeta Chamorro*, Presiden Philipina *Margaret Thacher*, Pakistan *Benazir Botto*, walaupun eksistensinya banyak kalangan yang tidak menghendaki kepemimpinan perempuan. Akhirnya pemerintahannya digoyang dan menjadikan mereka semua jatuh.

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan budaya bangsa Indonesia kita ingin mewujudkan dan memiliki identitas gender yang mencerminkan perwujudan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan yang serasi selaras dan seimbang untuk mewujudkan identitas gender seperti yang dimaksud maka sejauh mungkin menghindari kesenjangan gender diberbagai bidang atau segi kehidupan. Untuk dapat menghilangkan kesenjangan tersebut haruslah diketahui kesenjangan itu dengan analisa gender.

Analisa gender bukan ditunjukkan untuk mengangkat perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi untuk mengetahui sejauh mana peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk proses pembangunan. Dengan pendekatan ini dimungkinkan untuk dilakukan perencanaan pembangunan yang peka dan tanggap terhadap gender dalam konteks yang memiliki *spisifikasi* tingkat perkembangan budayanya.

C. Perempuan Dalam Pembangunan

Upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam GBHN merupakan kehendak politik bangsa Indonesia yang strategis. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan, sehingga perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa. Dalam Repelita VI dikemukakan program peningkatan peranan perempuan

dalam pembangunan bersifat lintas bidang dan lintas sektoral, yang dilaksanakan secara operasional oleh instansi terkait dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan yaitu untuk meningkatkan kualitas perempuan dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung perempuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam pembangunan termasuk berbagai dimensi kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun dalam kenyataan sehari-hari persamaan seperti yang dimaksud belum sepenuhnya terwujud, disana sini masih banyak kita jumpai adanya kendala upaya peningkatan perempuan dalam pembangunan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus dapat dihilangkan apabila kita menginginkan keduanya dapat menjadi mitra sejajar seperti yang telah dicita-citakan dalam pembangunan.

Perjalanan tiga dasawarsa Orde Baru telah membawa bangsa Indonesia meraih banyak prestasi. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berjalan cukup stabil tetapi ada agenda lain yang tak kalah pentingnya yakni bagaimana hasil-hasil pertumbuhan tersebut dipandang dari prespektif keadilan sosial. Karena pada dasarnya pembangunan adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemakmuran adalah hak seluruh rakyat dan bukan hak dari segelintir atau sekelompok masyarakat tertentu. Keadilan sosial yang dimaksud bukan hanya dalam konteks antar kelompok, antar golongan, antar daerah dan antar sektor pembangunan tetapi juga dalam konteks interaksi gender antara laki-laki dan perempuan.

Membicarakan keadilan sosial tanpa melibatkan masalah interaksi gender akan kehilangan salah satu dimensinya yang strategis. Karena pada kenyataannya, interaksi antara laki-laki dan perempuan masih banyak didasarkan pada pola lama yang cenderung patriarkis.

Pembangunan dan perempuan, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia menjadi agenda besar yang selalu ada pertanyaan mendasar yang muncul dari persentuhan antara pembangunan dan perempuan, terutama pada sisi kontribusi perempuan pada pembangunan dan pengaruh pembangunan terhadap kondisi sosial bagi kaum perempuan.